

## BAB 2

### IRLANDIA DI LEVEL INTERNASIONAL DAN NASIONAL

#### 2.1 Uni Eropa

Berawal dari kesepakatan ekonomi regional di antara enam negara bertetangga, Uni Eropa dewasa ini telah menjadi organisasi antarpemerintah supranasional yang terdiri dari 27 negara di Benua Eropa. Pembentukan organisasi ini diawali ketika berakhirnya dua Perang Dunia, di mana para pemimpin Eropa kemudian menginginkan perdamaian dan rekonsiliasi di penjuru benua. Pada 1950, Menteri Luar Negeri Prancis mengusulkan pengumpulan produksi baja dan batu bara di Eropa Barat yang kemudian menjadi dasar terbentuknya *European Coal and Steel Community* (ECSC). Kesuksesan komunitas tersebut kemudian melahirkan *European Economic Community* (EEC) dan *European Atomic Energy Community* (Euratom) melalui Perjanjian Roma di tahun 1957. Dekade berikutnya kemudian menyaksikan bergabungnya kedua organisasi tersebut secara resmi menjadi *European Community* (EC), yang menciptakan Komisi tunggal, Dewan Menteri tunggal, dan badan legislatif yang sekarang ini dikenal sebagai Parlemen Eropa. Organisasi tersebut kemudian mengalami perkembangan yang signifikan di tahun-tahun setelahnya, melakukan ekspansi dan menerima banyak keanggotaan baru dari negara-negara Eropa lainnya. Perjanjian Maastricht yang disahkan pada 1992 menjadi landasan untuk kerjasama lebih lanjut terkait kebijakan luar negeri dan pertahanan, peradilan dan urusan dalam negeri, serta pembentukan kesatuan ekonomi dan moneter, termasuk diberlakukannya mata uang bersama. Perjanjian tersebut merupakan awal dari Uni Eropa yang saat itu berdiri bersama EC (The World Factbook, 2024).

Untuk memastikan efisiensi Uni Eropa setelah bergabungnya lebih banyak anggota, Perjanjian Nice tahun 2000 menetapkan aturan yang menyederhanakan lembaga-lembaga di dalam Uni Eropa. Akan tetapi, rencana untuk menciptakan ‘Konstitusi untuk Eropa’ gagal ketika terdapat penolakan oleh Prancis dan Belanda di tahun 2005. Dua tahun setelahnya, upaya baru disusun dengan mengikutsertakan banyak unsur dari rancangan yang telah gagal sebelumnya dan menerapkan beberapa perubahan. Upaya tersebut kemudian menghasilkan Perjanjian Lisbon, yang mana mengubah perjanjian-perjanjian yang telah ada alih-alih menggantinya. Dirancang untuk menjadikan Uni Eropa lebih demokratis, efisien, dan transparan, perjanjian ini bertujuan agar Uni Eropa mampu menghadapi berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, keamanan, serta pembangunan berkelanjutan. Setelah disetujui oleh semua negara anggota, Perjanjian tersebut mulai berlaku pada 1 Desember 2009 dan secara resmi melakukan transisi bagi Uni Eropa untuk menggantikan EC (EUR-Lex, 2008). Dalam referendum yang dilakukan pada bulan Juni 2016, 52 persen pemilih di Inggris menginginkan negaranya untuk meninggalkan Uni Eropa setelah lebih dari 40 tahun menjadi negara anggota. Uni Eropa dan Inggris kemudian mendiskusikan perjanjian penarikan yang meliputi periode transisi hingga Desember 2020 ketika Perjanjian Kerjasama Uni Eropa-Inggris berakhir. Britania Raya akhirnya resmi lepas dari Uni Eropa pada 31 Januari 2020 dalam peristiwa yang dikenal luas sebagai ‘*Brexit*’.

Prinsip dan nilai-nilai umum yang mendasari kehidupan di Uni Eropa meliputi kebebasan, demokrasi, kesetaraan, serta aturan hukum yang mana mendukung terciptanya perdamaian dan keseimbangan. Kebebasan, keamanan, dan peradilan yang ditawarkan oleh Uni Eropa dilakukan tanpa adanya perbatasan internal dan bersamaan dengan kebijakan di

perbatasan eksternal untuk mengatur suaka dan imigrasi, serta mencegah dan memberantas kejahatan (European Union, *n. d.*). Gagasan untuk meniadakan perbatasan internal tersebutlah yang kemudian melahirkan Wilayah Schengen, sebuah wilayah di mana warga negara dari anggotanya dapat dengan bebas dan mudah mengunjungi, bekerja, dan belajar di negara anggota lainnya tanpa diperumit oleh pemeriksaan perbatasan.

## **2.2 Perjanjian Wilayah Schengen**

Wilayah Schengen merupakan perjanjian bebas perbatasan yang menjamin kebebasan pergerakan atas lebih dari 425 Juta masyarakat Uni Eropa, bersama dengan warga non-Uni Eropa yang sedang tinggal di Negara Anggota Uni Eropa atau sedang berkunjung sebagai turis, program pertukaran pelajar, ataupun sedang dalam perjalanan bisnis. Pergerakan bebas manusia ini memungkinkan tiap warga negara Uni Eropa untuk berpergian, bekerja, dan tinggal di Negara Uni Eropa tanpa harus menjalani pemeriksaan di perbatasan (European Commission, *n.d.*). Selain itu, pada perjanjian ini disepakati aturan yang disetujui bersama yakni mengenai kebijakan izin masuk jangka pendek (termasuk di dalamnya Visa Schengen), penyelarasan pemeriksaan perbatasan eksternal, dan kerjasama polisi lintas batas. Saat ini, Wilayah Schengen meliputi sebagian besar negara anggota Uni Eropa, dengan Bulgaria dan Romania sebagai negara anggota terbarunya tercatat mulai 31 Maret 2024. Meski begitu, terdapat negara anggota Uni Eropa yang tidak termasuk Wilayah Schengen yaitu Republik Siprus dan Republik Irlandia, serta negara non-Uni Eropa yang termasuk dalam Wilayah Schengen yaitu Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein.

Awal dari konsep kebebasan bergerak ini adalah agar populasi pekerja di Eropa dapat bebas melakukan perjalanan dan menetap di negara Uni Eropa manapun. Namun,

konsep tersebut masih gagal dalam menghapuskan pemeriksaan perbatasan di dalam Uni Eropa itu sendiri. Sebuah kesepakatan akhirnya tercapai pada tahun 1985 di sebuah desa kecil di Luksemburg yaitu Desa Schengen, yang mana merupakan lokasi penandatanganan perjanjian tentang penghapusan bertahap pemeriksaan di perbatasan yang diikuti dengan penandatanganan konvensi yang mengatur pelaksanaan perjanjian tersebut pada tahun 1990. Implementasi awal dari Perjanjian Schengen dimulai pada tahun 1995 dengan melibatkan lebih banyak negara lainnya setelah lima negara penandatanganan awal, yaitu Belgia, Prancis, Jerman, Luksemburg, dan Belanda. Kesepakatan yang awalnya lahir dari inisiatif antar pemerintah inilah yang nantinya akan berkembang dan diintegrasikan ke dalam kumpulan peraturan yang mengatur Uni Eropa melalui Perjanjian Amsterdam pada 2 Oktober 1997 (CVCE, 2016).

*Schengen Acquis*, atau “*Acquis Communautaire*” merujuk pada seperangkat aturan dan hukum, termasuk perjanjian, arahan, putusan pengadilan, dan lain-lain yang diperlukan agar Perjanjian Wilayah Schengen dapat berfungsi dengan baik. Negara anggota Uni Eropa, termasuk negara kandidat anggota, memiliki kewajiban untuk menerima akuisisi tersebut (Schengenvisainfo, *n.d.*). Selain negara anggota Uni Eropa, terdapat negara anggota Wilayah Schengen yang bukan merupakan bagian dari Uni Eropa. Meskti begitu bukan berarti mudah bagi suatu negara untuk bergabung dalam Wilayah Schengen. Negara tersebut perlu memenuhi serangkaian kriteria serta menjalani proses penilaian yang ketat sebelum bisa menjadi bagian dari Wilayah Schengen. Prasyarat yang harus terpenuhi sebelum negara dapat mengajukan untuk bergabung di antaranya yaitu:

- a. Menerapkan aturan umum Schengen (*Schengen Acquis*), seperti contohnya pemeriksaan perbatasan darat, laut, dan udara (bandara), penerbitan visa, kerja sama polisi, serta perlindungan data pribadi;
- b. Bertanggungjawab atas pemeriksaan perbatasan eksternal atas nama negara anggota Schengen lainnya, serta penerbitan visa Schengen yang seragam, secara efisien bekerja sama dengan lembaga penegakan keadilan di negara anggota Schengen lainnya, dan menjaga tingkat keamanan yang tinggi ketika pemeriksaan perbatasan antar negara anggota Schengen ditiadakan; serta
- c. Terhubung pada dan menggunakan *Schengen Information System (SIS)*.

Negara tersebut kemudian dievaluasi untuk menilai apakah mereka berhasil memenuhi syarat yang diperlukan untuk menerapkan peraturan Schengen tersebut. Kemudian setelah terkonfirmasi kesiapan negara untuk bergabung dalam wilayah tanpa pemeriksaan perbatasan, persetujuan mufakat dari semua negara anggota lainnya yang menerapkan Akuisisi Schengen diperlukan untuk dapat secara resmi menyambut negara anggota baru ke Wilayah Schengen. Bulgaria dan Romania telah berhasil melalui proses evaluasi Schengen tersebut, mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan diterapkannya semua bagian dari Akuisisi Schengen yang relevan. Dengan demikian, kedua negara secara resmi menerapkan aturan Schengen pada 31 Maret 2024. Di sisi lain, proses evaluasi Schengen untuk menilai kesiapan negara sedang berlangsung untuk Republik Siprus (Etias, 2023).

Dalam halaman resmi Uni Eropa, dijelaskan bahwa Perjanjian Schengen menghilangkan pemeriksaan di perbatasan internal Uni Eropa, selagi menyediakan seperangkat aturan pemeriksaan pada perbatasan eksternal yang dapat diterapkan untuk

siapapun yang ingin memasuki Wilayah Schengen dalam batas waktu singkat (hingga 90 hari). Perjanjian tersebut bergantung pada peraturan-peraturan umum yang khususnya mencakup bidang-bidang berikut:

1. Melintasi perbatasan eksternal Uni Eropa, termasuk jenis visa yang dibutuhkan;
2. Harmonisasi syarat dan ketentuan masuk serta peraturan visa kunjungan jangka pendek (hingga 90 hari);
3. Kerja sama polisi antar-perbatasan melalui sistem ekstradisi yang lebih cepat dan pengalihan penegakan putusan pidana;
4. *Schengen Information System* (SIS); dan
5. Dokumen yang diperlukan untuk bepergian di wilayah Eropa.

Dalam penerapannya, Perjanjian Wilayah Schengen ini telah memberikan beragam manfaat bagi negara anggotanya, terutama pada segi antrean lalu lintas Eropa. Antrean yang awalnya mencapai belasan kilometer untuk dapat melewati bagian pemeriksaan perbatasan, kini dapat dilalui dengan cepat dan mudah tanpa perlu menunggu dengan waktu yang lama dan berbelit. Keuntungan lainnya dari perjanjian ini yaitu di bidang ekonomi, terutama melihat adanya kelancaran perpindahan tenaga kerja antar negara anggota, serta dari sektor pariwisata (Davis & Gift, 2014). Selain itu dengan meratifikasi Perjanjian Wilayah Schengen, negara-negara tersebut memiliki kesempatan untuk melakukan kerja sama dengan organisasi penegak hukum negara lain di sekitar mereka terkait penanganan dan penindakan kejahatan transnasional (Council of Europe, 2003). Sebagai *Free Travel Area* terbesar di dunia, menjadi anggota dari Wilayah Schengen memiliki implikasi terlaksanakannya pemeriksaan dan kebijakan yang terharmonisasi berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Selain di bidang ekonomi, pertahanan, dan keamanan,

Wilayah Schengen juga mendorong peningkatan hubungan diplomatik antar negara anggota, kepercayaan dan kerja sama, serta kredibilitas dan pengaruh global Uni Eropa dan negara-negara anggotanya.

### 2.3 Common Travel Area

*Common Travel Area* (CTA) merupakan kesepakatan antara Britania Raya dan Republik Irlandia yang memberikan beragam hak bagi warga negara tersebut. Ketika dimulainya pengimplementasian CTA pada 1922, perjanjian tersebut tidak termasuk dalam legislasi manapun, melainkan merupakan sebuah kesepakatan di antara Britania Raya dan Republik Irlandia yang didasari oleh kesamaan sejarah mereka. Seiring berjalannya waktu, beberapa hak yang terkandung dalam perjanjian tersebut kemudian melebur ke dalam berbagai bagian legislasi baik di Britania Raya maupun di Irlandia. Pada 8 Mei 2019, pemerintah kedua negara menandatangani MoU atau Nota Kesepahaman yang menegaskan kembali terkait CTA dan mengidentifikasi hak-hak serta keistimewaan yang dimiliki oleh warga negara Republik Irlandia dan Britania Raya dalam naungan CTA. Meskipun perjanjian ini diakui di bawah Perjanjian Amsterdam, CTA tidaklah bergantung pada Uni Eropa dan keberlanjutan keanggotaan keduanya dalam Uni Eropa (Citizens Information, 2024).

Warga negara Republik Irlandia dan Britania Raya memiliki hak untuk tinggal, bepergian, bekerja, dan belajar di dalam *Common Travel Area*. Adapun hak dan keistimewaan lain yang turut melekat, yaitu: Akses terhadap keuntungan-keuntungan sosial, akses terhadap layanan kesehatan, akses terhadap bantuan perumahan sosial, serta hak pilih dalam pemilihan-pemilihan tertentu. Selain hak-hak dan keistimewaan tersebut, peraturan lainnya seperti yang terkait dengan perpindahan barang dan bea cukai tidak

diatur dalam CTA dan berada di bawah Perjanjian Perdagangan antar Britania Raya dan Republik Irlandia (GOV.uk, 2019).

Perjanjian CTA ini memungkinkan tidak adanya pemeriksaan paspor pada warga berkewarganegaraan Britania Raya maupun Republik Irlandia yang berpergian di dalam kedua wilayah tersebut. Meski begitu, penggunaan kapal feri dan pesawat sebagai moda transportasi masih mengharuskan calon penumpang untuk menunjukkan bukti identitas yang valid, yang diutamakan menggunakan paspor. Keterlibatannya dalam proses imigrasi tersebut menjadikan perjanjian ini juga menaungi beberapa kerjasama terkait isu-isu imigrasi. Sebagai contoh, petugas imigrasi Republik Irlandia memiliki kuasa untuk menjalankan pemeriksaan secara selektif terhadap pendatang dari Britania Raya dan kuasa untuk menolak masuknya pendatang tersebut ke wilayah negara dengan alasan yang sama yang berlaku pada pendatang yang masuk dari luar wilayah CTA. Dapat dilihat bahwa perjanjian ini memfasilitasi sifat lintas batas kehidupan banyak warga di wilayah-wilayah tersebut serta mencerminkan totalitas hubungan antara Inggris dan Irlandia (BIPA, 2023).

#### **2.4 *Opting-out* dari Wilayah Schengen**

Semenjak awal perumusannya, Republik Irlandia dan Britania Raya menjadi dua di antara negara-negara anggota Uni Eropa yang memilih untuk tidak meratifikasi Perjanjian Wilayah Schengen. Republik Irlandia sendiri meyakini bahwa berpartisipasi dalam Wilayah Schengen dapat berpotensi untuk mengganggu proses perdamaian yang sedang berjalan dan memperumit hubungannya dengan Britania Raya. Maka dari itu, ketika perundingan untuk Wilayah Schengen masih berlangsung, Republik Irlandia terlibat dalam negosiasi diplomatik dengan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya demi mengamankan klausa *opt-out* (EUR-Lex, *n.d.*). Kebijakan ini memungkinkan Irlandia



untuk mempertahankan pemeriksaan atas perbatasannya dan pengecualian terhadap aturan Schengen tertentu, sembari tetap menikmati keuntungan lain yang menjadi bagian dari integrasi Uni Eropa.

Sebuah keputusan di Pengadilan Eropa pada bulan Desember 2007 silam telah menyatakan dengan jelas bahwa Republik Irlandia dan Britania Raya memiliki hak untuk bergabung (*opt-in*) hanya pada undang-undang yang dibangun di atas sistem Schengen yangmana telah mereka ikuti secara resmi, yaitu kerja sama penegakkan hukum dan peradilan. Keterbatasan ini tentu menghalangi Inggris dan Irlandia untuk berpartisipasi secara penuh dalam skema masuk/keluar Komisi Eropa, meskipun mereka masih bisa bertukar dan berbagi data. Beberapa pejabat Komisi juga sependapat bahwa kedua negara tersebut tidak dapat terlibat sepenuhnya (Brunsdan, 2008). Dampak signifikan yang terjadi adalah warga non-Uni Eropa yang ingin bepergian dari Inggris atau Irlandia menuju daratan utama Eropa harus melalui pengecekan keamanan ekstra. Untuk mengurangi dampak tersebut, aturan keamanan di Inggris dan Irlandia kemudian diatur sehingga menyerupai milik negara anggota Schengen.

Asumsi utama alasan Republik Irlandia berada di luar Wilayah Schengen adalah Perjanjian *Common Travel Area* yang telah diratifikasinya bersama Britania Raya, yangmana secara efektif sebagian besar sudah merupakan area bebas paspor. Pilihan untuk *opt-out* tersebut juga dibarengi dengan kesadaran bahwa tidak meratifikasi Perjanjian Schengen berarti melewatkan berbagai keuntungan yang bisa didapatkan sebagai negara anggota. Meratifikasi perjanjian ini di masa depan pun menjadi wacana yang sangat kecil kemungkinannya, mengingat untuk dapat bergabung dalam Wilayah Schengen, terdapat

serangkaian tes yang harus Irlandia ikuti, dan perlunya mendapatkan persetujuan dari seluruh negara anggota Schengen yang diperumit oleh peristiwa Brexit.

## **2.5 Konstruksi Identitas Nasional Republik Irlandia**

Republik Irlandia merupakan salah satu negara yang tidak asing terhadap konflik. Tercatat dalam sejarah bahwa Republik Irlandia telah mengalami beragam peperangan baik dalam melawan ancaman dari luar seperti dominasi pemerintahan Inggris, hingga ancaman dari dalam seperti berbagai perang saudara yang terjadi, bahkan ketika Republik Irlandia telah menggaungkan kemerdekaannya. Sejarah perlawanan yang cukup panjang ini tidak dapat dipisahkan dengan pembentukan identitas Republik Irlandia itu sendiri dan menjadi salah satu pilar yang menyokong pengambilan keputusan nasional negara tersebut.

### **2.5.1 Sejarah Konflik Irlandia**

*Home Rule Crisis* merupakan konflik yang berlangsung pada masa di mana rakyat Irlandia mulai menginginkan kemerdekaan bagi negaranya sendiri. Bermula sejak 1870, Gerakan Pemerintahan Sendiri mulai dikampanyekan melalui pembentukan partai terkait dan pengenalan Rancangan Undang-undang Aturan Rumah. RUU tersebut berulang kali gagal disahkan pada 1882 dan 1893, baik oleh House of Commons maupun oleh House of Lords. Akan tetapi titik terang mulai terlihat setelah pencabutan hak veto milik *House of Lords* pada 1911. April 1912 Perdana Menteri Inggris, Herbert Asquith, mengenalkan yang disebut dengan RUU Aturan Rumah Ketiga (*Third Home Rule Bill*), yang dirancang untuk menciptakan parlemen di Dublin yangmana akan mengurus urusan-urusan Irlandia dengan sebagian kuasa masih dipegang oleh Parlemen Inggris di Westminster (Bowman *et al.*, 2021). RUU tersebut kembali menghadapi penolakan, terutama oleh Partai Serikat yang terlihat paling jelas di Provinsi Ulster di mana mayoritas populasinya merupakan penganut

agama Protestan. Para anggota serikat tersebut berkumpul dan bersatupadu dalam melawan pengesahan RUU tersebut, hingga membentuk organisasi-organisasi seperti Klub Serikat dan Sukarelawan Ulster untuk menggalang suara. (PRONI, 2021)

Pembentukan Sukarelawan Irlandia sebagai respon dari organisasi semi-militer tersebut menandai dimulainya Krisis Aturan Rumah (*Home Rule Crisis*), di mana konflik yang terjadi semakin tereskalasi dengan pengimporan senjata dan amunisi dari Jerman yang dilakukan oleh kedua belah pihak (Townsend, 2016). Berbagai insiden seperti Insiden Curragh (20-21 Maret), Penembakan Larne (24-25 April), serta Penembakan Howth (26 Juli) yang tentunya memakan korban jiwa semakin menanam keraguan pada pemerintah dalam menghadapi konflik, yang diperparah pula dengan campur tangan Inggris yang menempatkan pasukan di beberapa daerah di Irlandia. Pada akhirnya krisis tersebut dihindari sementara setelah pecahnya Perang Dunia I dengan RUU tersebut berakhir disahkan pada September 1914, akan tetapi implementasinya ditunda hingga perang berakhir.

Di tengah huru-hara Perang Dunia I, *Irish Republican Brotherhood* (IRB) yang berdedikasi pada pembentukan ‘republik demokratis independen’ di Irlandia perlahan mulai memunculkan taringnya. *The Easter Rising* atau Pemberontakan Paskah yang dimulai pada 24 April 1916 dan berlangsung selama enam hari ini diorkestrai oleh IRB yang bertujuan untuk mendirikan negara Irlandia merdeka dengan menyerang pemerintahan Inggris di Irlandia ketika negara tersebut sedang disibukkan dengan Perang Dunia I (Foy & Barton, 2011). Penangkapan dan eksekusi belasan pimpinan organisasi tersebut menimbulkan kekecewaan di mata masyarakat, yang kemudian diperparah dengan Krisis Wajib Militer oleh Inggris. Hal tersebut berujung pada rakyat Irlandia yang semakin

menginginkan perpisahan dan memindahkan suaranya dari mendukung Partai Parlemen Irlandia dengan aturan rumah nasionalisnya menjadi mendukung partai *Sinn Féin* yang lebih radikal pada pemilihan umum 1918. Anggota parlemen terpilih kemudian mendirikan parlemen terpisah di Dublin yaitu *Dáil Éireann* atau Majelis Irlandia pada 21 Januari 1919 (Houses of Oireachtas, 2020). Irlandia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya dari Inggris dengan meratifikasi Proklamasi Republik Irlandia yang disusun pada Pemberontakan Paskah sebelumnya.

Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Irlandia bukan berarti akhir dari konflik di Irlandia. Selain terjadinya Perang Revolusi antara Tentara Republik Irlandia (IRA) dengan Pasukan Inggris, tahun 1920 mencatat awal dari periode konflik sektarian *The Troubles* (1920-1922), yaitu konflik komunal antara kelompok serikat beragama Kristen Protestan dan mendukung Irlandia agar tetap di bawah pemerintahan Inggris dengan kelompok nasionalis yang mayoritas beragama Katolik dan mendukung kemerdekaan Irlandia (CHS, *n. d.*). Awal konflik ini yang masih berada dalam Periode Revolusi Irlandia menyebabkan adanya campur tangan tentara Inggris, terutama dalam perlawanan dengan masyarakat nasionalis Katolik. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar korban jiwa dari konflik tersebut merupakan rakyat beragama Katolik. Deeskalasi konflik berupa gencatan senjata baru terjadi pada 11 Juli 1921 setelah terjadinya Peristiwa *Belfast's Bloody Sunday* yang memakan 20 korban jiwa.

Negara tersebut kembali dilanda konflik ketika Perang Sipil terjadi antara Pemerintah Sementara Irlandia dan Tentara Republik Irlandia yang menentang Perjanjian Anglo-Irlandia (6 Desember 1921). Konflik tersebut lahir karena Pemerintah Sementara (yang pada Desember 1922 menjadi Negara Bebas Irlandia) memperlihatkan dukungan

terhadap perjanjian tersebut, akan tetapi oposisi mereka memandang perjanjian tersebut sebagai pengkhianatan atas Republik Irlandia yang dideklarasikan pada Pemberontakan Paskah sebelumnya. Konflik tersebut berlangsung selama sekitar 10 bulan, dan diakhiri setelah pimpinan Tentara Republik Irlandia mengeluarkan perintah untuk membuang senjata yang secara efektif mengakhiri konflik tersebut.

Akhir dari Perang Sipil Irlandia menyisakan sebagian dari Tentara Republik Irlandia (IRA) yang berkomitmen untuk menggunakan kekerasan demi mempersatukan kembali Irlandia. Undang-undang Kekuasaan Khusus yang disahkan Irlandia Utara pada 1922 memberikan kewenangan khusus untuk menahan dan menghukum tersangka tanpa adanya pengadilan. Pada masa tersebut kekerasan sektarian masih beberapa kali terjadi, hingga stabilitas sementara tercapai setelah diberlakukannya gencatan senjata IRA pada 1962.

Akhir tahun 1960an mencatat terjadinya kembali *The Troubles*, di mana sejarawan belum memiliki kesepakatan kapan pastinya masa tersebut dimulai di antara peristiwa-peristiwa seperti pembentukan Kekuatan Sukarelawan Ulster modern pada 1966, Mars Hak-hak Sipil pada Oktober 1968, dimulainya Pertempuran Bogside pada 12 Agustus 1969, atau Pengerahan Pasukan Inggris pada 14 Agustus 1969. Konflik yang berpusat di Irlandia Utara tersebut kembali mempermasalahkan konstitusi Irlandia Utara dan perselisihan antara kelompok nasionalis yang merasa termarginalisasi serta menginginkan persatuan Irlandia dengan kelompok serikat yang mengidentifikasi diri sebagai warga Inggris dan menginginkan untuk tetap menjadi bagian dari Britania Raya.

Meskipun IRA kemudian menyatakan gencatan senjata pada Juli 1997, terjadi perpecahan di dalam organisasi tersebut oleh anggota pembangkang yang menolak untuk

menerima *The Good Friday Agreement* dan proses pemulihan perdamaian di Irlandia Utara secara umum. Organisasi baru yang menamai diri mereka *Real Irish Republican Army* (RIRA) tersebut menyatakan bahwa keputusan untuk damai malah akan menghalangi tujuan utama mereka untuk menyatukan kembali Irlandia menjadi satu kesatuan yang utuh (Gough & Melaugh, 2003). Dalam usaha mereka untuk mencapai tujuan tersebut, telah tercatat beberapa kasus pengeboman di wilayah Irlandia Utara hingga Inggris yang memakan korban jiwa. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk menghentikan aksi teror organisasi paramiliter ini, akan tetapi penahanan pimpinan organisasi pada tahun 2001 dan 2002 pun tidaklah cukup untuk menghalangi mereka. Pada tahun 2012, kelompok-kelompok militan kecil seperti *Republican Action Against Drugs* (RAAD) dan lainnya dilaporkan telah mengintegrasikan diri mereka ke dalam RIRA, yang beberapa media kemudian mulai sebut sebagai “*New IRA*”.

Penggunaan kekerasan untuk mencapai sebuah hasil politik di dalam suatu masyarakat demokrasi menjadikan kasus yang dilakukan oleh RIRA ini dapat diklasifikasikan sebagai tindak terorisme, dan kelompok tersebut sebagai kelompok teroris (O’Brien, 1983). Dengan begitu, permasalahan ini dapat mulai ditangani dengan semestinya melalui penegakkan hukum atas aktivitas ilegal mereka. Selama ini organisasi tersebut dapat bertahan melalui sejarah yang menyelimuti pembentukannya dan dukungan publik dikarenakan kebutuhan umat Katolik di Irlandia Utara untuk memiliki simbol kekuasaan serta ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan yang didominasi oleh penganut Protestan. Meski begitu, mayoritas umat Katolik itu sendiri menentang aktivitas kekerasan yang dilakukan oleh RIRA. Harapan untuk mengakhiri aksi teror organisasi

tersebut dititikberatkan pada semakin berkembangnya penolakan komunitas Katolik terhadap taktik penggunaan kekerasan yang tidak menghargai Hak Asasi Manusia.

Periode konflik tersebut tentunya memakan tidak hanya ribuan korban jiwa, tetapi juga memaksa masyarakat untuk mengungsi dikarenakan rusak atau hilangnya rumah mereka. Konflik tersebut juga memiliki pengaruh besar terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Irlandia. Selain itu, serupa dengan periode *The Troubles* sebelumnya, pergulatan politik yang terjadi melahirkan generasi yang cenderung enggan untuk berpartisipasi secara politik (Muldoon, 2004). Luka tersebut kemudian terbawa dari generasi ke generasi, hingga mencapai dewasa ini. meski begitu *The Good Friday Agreement* tersebut tercatat sebagai langkah awal pencapaian perdamaian dan rekonsiliasi antara Republik Irlandia dan Irlandia Utara, yang mana menjadi bagian dari Proses Pemulihan Perdamaian yang hingga saat ini diprioritaskan oleh Republik Irlandia.

## **2.5.2 Pengaruh Sejarah Republik Irlandia terhadap berbagai Kebijakan**

### **2.5.2.1 Kebijakan Perubahan Konstitusi dan Netralitas Militer**

Desember 1918 menandai kemenangan telak Partai *Sinn Féin* yang kemudian mengadakan *Dáil Éireann* pertama pada 21 Januari 1919 untuk mendeklarasikan kemerdekaan Irlandia serta menegaskan eksistensi dari Republik Irlandia. Mereka kemudian harus melewati Perang Kemerdekaan Irlandia (1919-1921) dan berada di dalam Britania Raya dalam bentuk Negara Bebas Irlandia, sebelum pemerintahan negara baru tersebut mengonsolidasi posisi mereka dan membangun di atas kedaulatan yang diraih di tahun 1922, hingga berpuncak pada deklarasi formal atas bentuk negara republik pada 18 April 1949 (University College Dublin Archives, *n.d.*). Keputusan ini jelas dipengaruhi oleh keinginan sebagian besar dari Irlandia untuk lepas dari campur tangan Inggris dan

menjadi negara yang dapat berdiri sendiri. Selain itu, konflik bersenjata yang mengiringi pertumbuhan negara baru tersebut, baik sebelum maupun setelah hari lahirnya, menjadi titik tolak kebijakan netralitas di Irlandia.

Kendati demikian, dalam konstituen Irlandia itu sendiri tidak menyebutkan secara eksplisit dan spesifik kebijakan netralitas yang telah diadopsi. Keputusan untuk bersikap netral tersebut lebih mengarah kepada sebuah tradisi dan prinsip politik dibandingkan dengan sebuah undang-undang memiliki wujud dalam konstitusinya. Meski begitu, kebijakan netralitas ini dapat jelas terlihat dari berbagai pernyataan dan sikap yang diambil Pemerintah Irlandia. Salah satu bentuknya yaitu *Triple Lock Mechanism*, yang merujuk pada tiga langkah yang harus dilalui sebelum lebih dari 12 anggota Pasukan Pertahanan dapat dikirim ke luar negeri dalam misi apapun. Mekanisme ini mengharuskan keputusan pengiriman pasukan tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Irlandia, Mosi parlemen Irlandia (*Dáil Éireann*), serta Dewan Keamanan PBB sebelum dapat dilaksanakan (Lehane, 2024).

Sikap netral ini juga telah ada sejak Perang Dunia II, di mana parlemen Irlandia mengadopsi kebijakan ini atas dorongan Perdana Menteriya saat itu, Éamon de Valera, menghadapi pecahnya perang di Eropa (Crowe et al., 2008). Meski saat itu Irlandia masih terikat dengan Inggris sehingga masih ada warga berkebangsaan Irlandia yang turun ke medan perang, kebijakan netralitas tersebut terus berlanjut dan diterapkan hingga sekarang. Hal tersebut tercermin dalam ketidakikutsertaannya dalam NATO serta penggunaan militernya yang dikhususkan hanya untuk pertahanan nasional dan misi-misi kemanusiaan di daerah konflik. Selain itu, menanggapi krisis penjajahan Rusia atas Ukraina di tahun 2022 silam, Republik Irlandia memutuskan untuk mengirim bantuan militer non-



mematikan ke Ukraina dengan tetap mempertahankan netralitasnya (Irish Independent, *n.d.*).

### **2.5.2.2 Kebijakan Ekonomi**

Untuk membangun negara baru tentu akan memakan biaya. Apabila perpisahan yang terjadi berlangsung damai mungkin biaya yang diperlukan tidak begitu signifikan. Akan tetapi ketika perpisahan tersebut berbentuk proklamasi kemerdekaan yang dimenangkan setelah konflik berkepanjangan, perpisahan tersebut kemungkinan besar diikuti oleh biaya yang tinggi serta kebijakan ekonomi yang melihat ke dalam. Dengan kata lain, kebebasan bergerak pemerintahan baru Republik Irlandia ditentukan oleh masa lalu mereka (Ó Gráda & O'Rourke, 2021). Pengalaman berada di bawah pemerintahan Inggris menjadikan kebijakan awal ekonomi Irlandia mengadopsi sifat yang cenderung konservatif, termasuk menginginkan peningkatan swasembada melalui industrialisasi yang didukung oleh perlindungan tarif di kota-kota, dan peralihan dari tanaman rumput ke sereal di pedesaan.

Bersama dengan kebijakan proteksionisme yang diterapkan di tahun 1930-an, keterlibatan Irlandia dalam perekonomian dunia dibatasi oleh tingginya tarif, kuota, dan sejumlah pembatasan lainnya terhadap impor dan investasi masuk (Breen & Morgan, 2013). Akan tetapi sulitnya sejarah politik dan ekonomi yang sama pula yang melihat Irlandia dibebani oleh deindustrialisasi, krisis agraris, kelaparan, serta emigrasi yang memangkas populasi negara tersebut hingga setengahnya. Ketidakefisienan yang menghambat laju ekonomi dan pengakuan atas lemahnya kebijakan proteksionisme oleh para pembuat keputusan menjadi akhir dari kebijakan tersebut dan dimulainya transformasi ekonomi menuju kebijakan yang melihat ke luar (O'Donnell, 1998). Hal inilah merupakan

bukti adanya perubahan kebijakan ekonomi yang dipengaruhi oleh sejarah dan proses perkembangan perekonomian Irlandia itu sendiri.

### **2.5.2.3 Kebijakan Hubungan Luar Negeri**

Akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebijakan proteksionisme tersebut, Republik Irlandia telah berupaya untuk mengatasinya dengan berbagai kebijakan, termasuk menciptakan industri dalam negeri dengan menggunakan subsidi dan tarif protektif serta mengadopsi kebijakan perdagangan bebas dengan negara-negara tertentu dan mendorong investasi asing pada akhir 1950an. Selain itu, salah satu penerapan dari bergantinya kebijakan ekonomi Republik Irlandia lainnya adalah bergabungnya negara tersebut dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) yang kemudian menjadi Uni Eropa. Dengan bergabungnya Republik Irlandia tersebut diharapkan dapat bergabung dengan ledakan keuntungan pasca perang dan serta mendapatkan manfaat dari perdagangan bebas dan globalisasi yang dipromosikan oleh Uni Eropa. Meski begitu, tergabungnya Irlandia tetaplah dengan menekankan identitas dan kebijakan nasional negara tersebut untuk meraih manfaat ekonomi dan tetap menjaga netralitas serta independensinya (Ireland Department of Foreign Affairs, *n.d.*).

Yang tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana sejarah Irlandia telah membentuk identitas dan memengaruhi pendekatan yang digunakan terkait hubungan negara tersebut dengan Irlandia Utara. Setelah deklarasi kemerdekaan dan fenomena *The Partition* yang membagi Irlandia menjadi dua daerah dengan pemerintahan yang berbeda, hubungan di antara keduanya tidak dapat dikatakan mulus. Setelah kebijakannya dalam penandatanganan *Good Friday Agreement* pada 1998 yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki hubungan mereka, Republik Irlandia kini beralih gencar

mengupayakan adanya Upaya Pemulihan Perdamaian di Irlandia Utara yang masih dapat dikatakan sebagai saudara mereka.

#### **2.5.2.4 Proses Pemulihan Perdamaian Irlandia Utara**

Setelah bangkit dari sejarah yang dipenuhi oleh konflik dan pertumpahan darah, tidak mengherankan apabila kini Republik Irlandia menggencarkan upaya pemulihan perdamaian antara dirinya dengan Irlandia Utara. Daratan Zamrud tersebut telah memfasilitasi berbagai perbincangan kesepakatan perdamaian serta program-program lainnya, utamanya Proses Pemulihan Perdamaian yang bertujuan untuk mengembalikan perdamaian, menegakkan Hak Asasi Manusia, serta mengembalikan kualitas hidup rakyat baik di Republik Irlandia maupun di Irlandia Utara. Proses ini tentunya bukanlah hal yang mudah, akan tetapi Republik Irlandia berkomitmen untuk memperbaiki bukan hanya hubungan bilateral dengan Irlandia Utara, tetapi juga aspek-aspek kehidupan masyarakat lainnya.

Menurut berbagai ahli yang mempelajari proses pemulihan perdamaian di Irlandia Utara, terdapat beberapa perspektif dalam titik permulaan dari proses tersebut. Beberapa menganggap bahwa awal tahun 1980an memulai proses tersebut ketika *Sinn Féin* mengadopsi strategi politik baru seperti strategi *Armalite* dan Kotak Suara (Hancock, 2008). Selain itu beberapa melihat Perjanjian Anglo-Irlandia pada 1985 sebagai langkah awal yang substansial terhadap perdamaian, sedangkan sisanya percaya bahwa Perjanjian Sunningdale pada tahun 1973 merupakan titik tolak proses perdamaian meskipun mengalami kegagalan. Kendati pecahnya suara terkait hal tersebut, para ahli sepakat bahwa kesemua perjanjian tersebut merupakan bagian dari serangkaian diskusi dan kesepakatan yang berujung pada *The Good Friday Agreement*.

*The Good Friday Agreement* sendiri dapat dikatakan merupakan upaya untuk membangun dan mempertahankan perdamaian di Irlandia Utara. Penandatanganan perjanjian tersebut mengakhiri konflik tiga dekade yaitu *'The Troubles'* yang menuai kerugian, baik dari pihak Irlandia Utara maupun Republik Irlandia. Perjanjian ini juga mengakui identitas ganda Irlandia Utara, sehingga memungkinkan bagi rakyatnya untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai warga negara Inggris, Irlandia, ataupun keduanya. Di sisi lain, perjanjian ini memberi jalan untuk ditetapkan pemerintah *power-sharing* atau pembagian kekuasaan, memfasilitasi pelucutan senjata, serta penghapusan pemeriksaan perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia (Department of Foreign Affairs, *n.d.*).

Perjanjian ini menghadapi beberapa tantangan, mengingat penyusunannya memiliki tujuan awal untuk menghentikan kekerasan dan perpecahan yang terjadi antara kedua kelompok yang memiliki identitas dan aspirasi yang berbeda. Keamanan menjadi poin penting dalam pengimplementasian poin-poin yang terkandung dalam perjanjian ini, terutama perihal pelucutan senjata dan demobilisasi kelompok paramiliter, serta memastikan keamanan bagi seluruh komunitas yang ada (Debraggio, 2010). Selain itu, perjanjian ini menuntut level kerjasama yang cukup tinggi, tidak hanya di antara Republik Irlandia dengan Irlandia Utara, tetapi juga dukungan Pemerintah Inggris agar implementasi dapat berjalan dengan semestinya. Meski begitu, para ahli sepakat bahwa perjanjian ini dinilai efektif karena mampu merubah hubungan bilateral, memupuk perdamaian, serta membahas tantangan ekonomi, sosial, dan politik kedua negara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa *The Good Friday Agreement* beserta perjanjian, dokumen-dokumen, dan kegiatan resolusi konflik komunitas lainnya menjadi instrumen

penting dalam membina rekonsiliasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberhasilan implementasi Proses Perdamaian di Irlandia Utara. Salah satu pilar yang menopang proses ini adalah tidak adanya pemeriksaan ketat di perbatasan, sebagai salah satu bentuk implementasi perjanjian tersebut. Hal ini didukung pula dengan adanya kesepakatan lain yaitu *Common Travel Area* yang mengatur bagaimana perlintasan manusia dapat dilakukan dengan mudah di antara kedua wilayah. Perdamaian yang tumbuh dari proses panjang rekonsiliasi inilah yang kemudian menjadi titik kritis dan memerlukan perhatian khusus apabila Republik Irlandia mengalihkan pandangan pada Perjanjian Schengen.